PERSPEKTIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN DOMPU

Oleh:

Nurhalifah

Nim: 23200012058

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)

Program Study Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publi

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1115/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : Perspektif Feminisme Terhadap Implementasi Perda Ntb Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURHALIFAH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23200012058
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. ZULFIKAR ISMAIL, Lc., MA.
SIGNED

Valid ID: 6a87dc322d750

Penguji II

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a87d27cf249f

Penguji III

Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8807b5a069d

Yogyakarta, 13 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a88063d45147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nurhalifah.
NIM	: 23200012058.
Jenjang	: Magister
Prodi	: Interdiciplinary Islamic Studies.
Konsentrasi	: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa Asia tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk berdasarkan sumbe yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Nurhalifah

NIM : 23200012058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIRISME

Yang bertanda tangan di bawah in :

Nama : Nurhalifah.

NIM : 23200012058.

Jenjang : Magister

Prodi : Interdiciplinary Islamic Studies.

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27, Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Nurhalifah

NIM : 23200012058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang bejudul: **PERSPETIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PECEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DOMPU**

yang ditulis oleh :

Nama : Nurhalifah.

NIM : 23200012058.

Jenjang : Magister

Prodi : Interdiciplinary Islamic Studies.

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2026.



Dr. Suhadi, S.Ag.,M.A

NIP: 197709130000001301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pernikahan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Dompu, masih menjadi permasalahan sosial-kultural dan hukum yang sangat serius. Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dimaksudkan sebagai instrumen hukum regional untuk menekan angka pernikahan dini. Namun, dalam tataran praktis, implementasi kebijakan ini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu masih belum optimal akibat adanya kesenjangan antara desain normatif (*law in books*) dan realitas sosial di lapangan (*law in action*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Dompu melalui lensa feminisme interseksional. Secara spesifik, penelitian ini berupaya memetakan bentuk keberpihakan kebijakan terhadap perempuan, mengurai interseksi kerentanan (gender, kelas sosial, etnis, agama, dan geografi) yang memperbesar risiko anak perempuan terjebak dalam pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi oleh lembaga pelaksana. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini dibangun di atas empat pilar utama, yaitu Teori Feminisme Interseksional (Kimberlé Crenshaw dan Patricia Hill Collins), Teori Implementasi Kebijakan Publik (Merilee Grindle dan George Edwards III), Teori Patriarki Struktural (Sylvia Walby), dan Teori Hak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis dan desain studi kasus instrumental tunggal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 37 informan (terdiri dari birokrat Dinas P3A, aparat hukum Pengadilan Agama dan KUA, aktivis LSM, serta perempuan penyintas dan anak berisiko), observasi partisipatif terbatas, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis tematik interseksional dan analisis kebijakan feminis (*feminist policy analysis*). Hasil analisis data lapangan dan wawancara awal menunjukkan bahwa implementasi Perda menghadapi fenomena decoupling dan policy bottleneck. Di tingkat struktural, terjadi pengabaian (structural negligence) berupa absennya regulasi turunan yang mengikat (Pergub/Perbup) serta kelangkaan fiskal (budgetary starvation) yang membuat program pencegahan berjalan setengah hati. Di tingkat kultural, dominasi relasi kuasa patriarkal dan tradisi lokal berinteraksi dengan tingginya angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja, yang pada akhirnya menggeser fungsi Perda dan lembaga hukum dari alat pencegahan menjadi alat legalisasi kedaruratan sosial melalui dispensasi nikah. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif secara interseksional bagi penguatan perlindungan anak di Kabupaten Dompu.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Perda NTB No. 5 Tahun 2021, Feminism Intersectional, Kebijakan Publik, Dinas P3A Kabupaten Dompu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tembok-tembok sistem Pendidikan harus diruntuhkan. Pendidikan seharusnya bukan hak istimewa, sehingga anak-anak dari keluarga kaya saja yang bisa belajar’’

(Che Guevara).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang tertulis kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Nenekku tercinta Hj. Siti Hawa terima kasih telah memotivasi dan memberikan dukungan finansial dalam proses penyelesaian perkuliahan ini tidak ada yang bisa di balas dengan kata-kata hanya di kertas ini kasih sayang yang begitu luas untukku.

Untuk Suami ku tercinta Rudiansyah Ramadhan terima kasih untuk segala cinta, dukungan dan kerjasama dalam menyelesaikan tesis ini, semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar bisa terus menemani langkah kecil ini. Untuk adik-adikku, keluarga besar, sahabat-sahabat yang terkasih dalam hidup saya, semoga Allah menyayangi kalian semua sebagaimana kalian mengasihi saya. Dan terakhir untuk almamater tercinta, program studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, pembangunan dan Kebijakan publik. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat, hidayat, serta karunia-Nya, peneliti ini dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "PERSPEKTIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DOMPU".

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat,dan seluruh pengikutnya yang telah membawa petunjuk dan cahaya bagi umat manusia menuju jalan keselamatan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini hingga selesai tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan, bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berharga sepanjang proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan ketulusan, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.A., Ph,D. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Najib Kailani, S.Fil,.I., M.A., Ph,D. Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Dr. Suhadi, S.Ag.,M.A., Dosen Pembimbing tesis. Terima kasih telah memotivasi dalam setiap kuliahnya dan memberikan kemudahan dalam mengarahkan pembuatan tesis ini hingga selesai.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. Konsentrasi Islam, Pembangunan dan kebijakan publik, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran di kampus ini.

8. Segenap staf dan karyawan di Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. Konsentrasi Islam, Pembangunan dan kebijakan publik, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti dalam mengurus berbagai hal terkait perkuliahan.

9. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mawardi, Bapak Muhammad Jihadi S.pd dan Ibu Nurhayati, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Kepada Rudiansyah Ramadhan, suami tercinta terima kasih untuk segala cinta, dukungan dan kerjasama dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada sahabat-sahabat YPKP Angkatan 2024, terima kasih sudah membersamai dalam masa-masa perkuliahan di kampus tercinta. Senang rasanya bisa kenal dan berdiskusi bersama kalian.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, da doa yang diberikan oleh berbagai pihak eapad peneliti senantiasa diterima dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi peningkatan kualitas peneliti di masa mendatang serta pengayaan ilmu peneliti sendiri. Peneliti juga berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi peneliti pribadi maupun bagi para pembaca. Amin ya robbal-alamin.

Yogyakarta, 26 Juni 2026.

Penulis,

Nurhalifah NIM: 23200012058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan dan Signifikan Penelitian 11

D. Kajian Pustaka 18

E. Kerangka Teoretis 28

F. Metodelogi penelitian. 56

BAB II 94

A. Gambaran Umum Kabupaten Dompu 94

1. Kondisi Geografis dan Demografi 94

B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu 97

1. Visi & Misi 97

2. Struktur Organisasi 99

3. Tugas Pokok & Fungsi. 99

4. Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Dompu. 101

C. Struktur Pemerintahan dan Kewenangan Daerah 103

D. Kondisi Sosial Budaya dan Masyarakat 105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kebudayaan Masyarakat Dompu 107
F. Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Dompu 109
G. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kabupaten Dompu 67
1. Faktor Ekonomi 67
2. Faktor Pendidikan 67
3. Faktor Sosial Budaya 67
4. Faktor Pergaulan Remaja 69
H. Tahapan atau proses sosialisi PERDA Nomor 5 Tahun 2021 T 69
BAB III 79
A. Gambaran Umum Feminisme dalam Kebijakan Daerah 79
Tabel 5. Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Dompu 82
B. Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di NTB 83
C. Implementasi Nilai Feminisme dalam Perda NTB Nomor 8 Tahun 2015 Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan 91
D. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender 96
E. Analisis Perspektif Feminisme terhadap Perda NTB Nomor 8 Tahun 2015 99
BAB IV 105
A. Analisis Keberpihakan PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Anak di Kabupaten Dompu 105
B. Interseksionalitas Kerentanan Seksualitas Anak Perempuan dan Beban 118
C. Hambatan Institusional dan Bias Struktural Dinas P3A Kabupaten Dompu dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak 125
BAB V PENUTUP 135
A. Kesimpulan 135
B. Saran 136
DAFTAR PUSTAKA 139
Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah 139
Dokumen Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 142

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Laporan Instansi dan Data Lapangan..... 144
BIODATA PENULIS..... 146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Kerangka Teori, Konsep Kunci, dan Fungsi Analisis 33

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 41

Tabel 3. Daftar informan Penelitian 42

Tabel 4. Matriks Kesesuaian Pertanyaan Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Analisis 56

Tabel 5. Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Dompu 74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Dompu 60

Gambar 2. Bagan Proses sosialisasi PERDA No 5 Tahun 2021 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Dompu termasuk daerah dengan angka PAUD yang tinggi. Berdasarkan data BPS NTB tahun 2021, angka dispensasi kawin di Kabupaten Dompu mencapai 900 kasus. Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Menurut data BPS tahun 2021, 10,2% perempuan berusia 15-19 tahun di Indonesia sudah menikah atau hidup berpasangan. Pernikahan dini mempunyai banyak dampak negatif bagi perempuan dan anak, termasuk kesehatan reproduksi yang buruk, pendidikan yang rendah, dan kemiskinan. Saat ini dengan masalah yang begitu kompleks, menjadi lahan subur bagi praktik perkawinan dibawah umur. NTB Sampai saat ini praktik pernikahan dini masih mengalami peningkatan.[1]

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun ke tahun bahwa pernikahan dini di NTB sangat marak terjadi sesuai data yang ditulis oleh penulis sebelumnya. Berdasarkan kasus pernikahan anak diatas, maka NTB saat ini telah mengeluarkan PERDA terbaru untuk mencegah maraknya pernikahan dini dengan membuat PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak yang disahkan pada hari kamis, tanggal 3 Juni 2021. Hal ini setidaknya mampu meminimalisir terjadinya pernikahan dini baik itu yang di kota ataupun di Desa. Dengan adanya aturan ini berfungsi sebagai instrumen

[1] Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Perkawinan dan Perceraian 2021. https://www.bps.go.id diakses pada tanggal 23 Mei 2024, pukul 20:00.

hukum regional yang bertujuan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. secara normatif, PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 mengamanatkan berbagai upaya pencegahan yang melibatkan lintas sektor mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan perempuan.[2]

Pelaksanaan PERDA NTB Tentang pencegahan perkawinan anak, kini sudah mulai merata ke tiap-tiap kabupaten dan sampai ke desa-desa, walaupun masih belum maksimal untuk meniadakan kasus pernikahan anak, namun setidaknya mampu meminimalisir dan menekan laju pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat. Kini PEMPROV mengajak kepada semua pihak seperti pemerintah desa agar memperketat peraturan daerah NTB terbaru, supaya memberikan dampak yang lebih baik lagi di dalam masyarakat dan bekerja sama dengan pihak KUA masing-masing kecamatan melakukan sosialisasi tentang PERDA dan pencegahan perkawinan di usia anak.

Pelaksanaan PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di kabupaten Dompu berdasarkan data di atas bahwa Dompu salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang mengalami naik turun untuk statistik perkawinan anak. 2 Yaitu dari jumlah pernikahan anak di tahun 2019 sebanyak 77 orang kemudian di tahun 2020 naik menjadi 177 orang dan setelah PERDA Nomor 5 itu dikeluarkan tingkat perkawinan anak menurun menjadi 110 di tahun 2021. Namun, belum mampu lebih turun dari 2019 dan tidak bisa

[2] Efendi S, Assaori,M.S, Implementasi pencegahan perkawinan anak berdasarkan PERDA Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021

di pungkiri beberapa desa di kabupaten Dompu mengalami peningkatan kasus pernikahan anak. Kabupaten Dompu, salah satu kabupaten di Provinsi NTB menjadi representasi nyata dari kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Angka perkawinan anak di kabupaten Dompu masih tergolong tinggi dan pelaksanaan PERDA tersebut menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensi. pernikahan anak di tahun 2019 sebanyak 77 orang kemudian di tahun 2020 naik menjadi 177 orang dan setelah PERDA Nomor 5 itu dikeluarkan tingkat perkawinan anak menurun menjadi 110 di tahun 2021.[3]

Namun, belum mampu lebih turun dari 2019 dan tidak bisa di pungkiri beberapa desa di kabupaten Dompu mengalami peningkatan kasus pernikahan anak. Kabupaten Dompu, salah satu kabupaten di Provinsi NTB menjadi representasi nyata dari kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Angka perkawinan anak di kabupaten Dompu masih tergolong tinggi dan pelaksanaan PERDA tersebut menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Dompu sebagai lembaga teknis yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini, berada di garis terdepan dalam upaya pencegahan, namun juga menghadapi keterbatasan, sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan resistensi budaya yang signifikan. Namun demikian, kebijakan dalam tataran normatif tidak selalu berbanding lurus dengan

[3] BP2AKB Provinsi NTB, https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id di akses pada tanggal 23 Mei 2024,

pukul 20:00.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

implementasi di lapangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Dompu sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di daerah menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 masih belum optimal, hal ini tercermin dari masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Dompu yang pada tahun 2022 tercatat mencapai angka yang mengkhawatirkan berdasarkan laporan Pengadilan Agama setempat terkait dispensasi perkawinan.[4]

Persoalan perkawinan anak tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai masalah hukum semata. Praktik ini berakar pada struktur sosial yang sarat dengan relasi kuasa patriarkal, norma budaya lokal seperti tradisi mbolo weki di Dompu, tekanan ekonomi keluarga, serta konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi atas tubuh dan masa depannya sendiri.[5]

Di sinilah pendekatan feminisme l menjadi relevan sebagai kerangka analisis, karena ia mampu membaca secara komprehensif bagaimana berbagai sumbu identitas seperti gender, kelas sosial, etnisitas, wilayah geografis, dan agama saling bersilangan dan membentuk pengalaman penindasan yang berlapis bagi anak perempuan yang rentan terhadap perkawinan dini.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Vina Adriany, Nelis Nazziatus Sadiah Qosyasih, Elly Malihah, "Unpacking the Discourse of child Marriage in Indonesia : A Decolonial Perspektive" Wiley Online Library, Vol. 40, No. 1, 2025, Hal, 89-98, https://doi.org/10.1111/chso.13013

[5] *Jurnal Hukum, Humaniora,Masyarakat, dan Budaya"* Vol.5, No.2, 2026 Hal. 166-177.

[6] Apriansyah, J, Evi Satispi, Taewoo Park, Muhammad Sahrul, Bariyah, O.N. "Negotiating

Maerariq: Cultural continuity and state efforts to preven child Marriage in East Lombok", *Jurnal Antropologi: Isu-isu social budaya*, Vol. 27, No. 2, 2025, Hal, 155-165.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teori feminisme yang dipopulerkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989) menegaskan bahwa tidak ada bentuk penindasan yang bersifat tunggal. Seorang anak perempuan dari keluarga miskin di pedesaan Dompu yang terancam dinikahkan secara dini mengalami penindasan berlapis: ia adalah perempuan dalam sistem patriarkal, ia adalah anak tanpa kapasitas hukum penuh, ia berasal dari kelas ekonomi bawah yang membuat orang tuanya menganggap pernikahan sebagai solusi ekonomi, dan ia tinggal di wilayah rural yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak. Pendekatan interseksional memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada satu dimensi, tetapi menelusuri bagaimana sistem-sistem operasi tersebut bekerja secara simultan.

Kritik feminisme terhadap implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, terdapat pertanyaan mendasar apakah kebijakan ini benar-benar dirancang dengan perspektif gender yang sensitif terhadap keragaman pengalaman perempuan, ataukah masih bersifat gender-neutral yang pada akhirnya justru mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok paling rentan. Kedua, mekanisme implementasi yang dilakukan oleh Dinas P3A perlu ditelaah apakah sudah mampu menjangkau anak-anak perempuan dari kelompok marjinal yang mengalami interseksi kerentanan berganda.

Ketiga, perlu dievaluasi apakah pendekatan kelembagaan yang ada sudah mempertimbangkan kompleksitas sosio-kultural yang menjadi akar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

permasalahan perkawinan anak di Dompu.[7] Studi kasus di Dinas P3A Kabupaten Dompu dipilih karena beberapa pertimbangan. Kabupaten Dompu secara historis memiliki angka perkawinan anak yang tinggi yaitu pada tahun 2023 sebanyak 297 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 124 kasus dengan rata-rata umur 17-18 tahun, dengan faktor-faktor pendorong yang khas, termasuk kuatnya tradisi budaya Mbojo, tekanan ekonomi masyarakat agraris, serta minimnya kesempatan pendidikan lanjutan bagi anak perempuan di daerah pedesaan. Dinas P3A sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi faktor kunci yang memiliki otoritas dan sumber daya dalam mengoperasionalkan perda tersebut.

Dengan demikian, analisis terhadap cara kerja, program, dan capaian lembaga ini akan memberikan gambaran yang representatif mengenai efektivitas dan kelemahan implementasi kebijakan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perkawinan anak dari berbagai perspektif. Penelitian Fadlyana dan Larasaty menyoroti dampak medis perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi Perempuan pada tahun 2009. Penelitian UNICEF Indonesia memetakan faktor- faktor sosial ekonomi yang mendorong praktik perkawinan anak. Sementara itu, kajian hukum oleh Nuzulia menganalisis aspek normatif kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat nasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan usia dini dan permasalahannya *"Jurnal Sari Pediatri"* Vol. 11, No. 2, 2009, Hal 136-140.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Namun, belum terdapat kajian yang secara spesifik menggunakan perspektif feminisme untuk mengkritisi implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021, khususnya dalam konteks kelembagaan Dinas P3A Kabupaten Dompu. Kesenjangan akademik inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.8 Penggunaan perspektif feminisme dalam penelitian kebijakan publik di Indonesia masih tergolong relatif baru. Sebagian besar kajian kebijakan perlindungan anak masih didominasi oleh pendekatan hukum positivistik dan sosiologi hukum konvensional yang cenderung melihat permasalahan secara linear. Padahal, realitas sosial yang dihadapi oleh anak perempuan yang rentan terhadap perkawinan dini jauh lebih kompleks dan membutuhkan kerangka analisis yang mampu menangkap kerumitan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi kebijakan berbasis gender, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh Dinas P3A Kabupaten Dompu dan pemangku kebijakan lainnya untuk memperkuat efektivitas implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan kompleksitas masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Dompu melalui kacamata feminisme interseksional. Secara lebih spesifik, analisis akan diarahkan untuk memetakan bentuk keberpihakan kebijakan, mengurai interseksi kerentanan yang dialami anak perempuan di tingkat lokal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pokok masalah sebagai berikut:"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk keberpihakan PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana interseksi antara gender, kelas sosial, mempengaruhi kerentanan anak perempuan terhadap praktik perkawinan anak di Kabupaten Dompu ?

C. Tujuan dan Signifikan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap implementasi Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak melalui perspektif feminisme interseksional, dengan mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Dompu. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons kebutuhan dan kerentanan berlapis yang dialami oleh anak perempuan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang spesifik di Kabupaten Dompu.

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dompu, meliputi program, kebijakan teknis, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta strategi pencegahan perkawinan anak yang telah dijalankan.

b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor struktural, kultural, dan institusional yang mempengaruhi efektivitas implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Dompu, dengan memperhatikan dimensi gender, kelas sosial, geografis, dan budaya lokal yang saling bersilangan.

c. Menerapkan kerangka teori feminisme interseksional untuk mengkritisi sejauh mana pendekatan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas P3A Kabupaten Dompu telah responsif terhadap kerentanan berlapis yang dialami oleh anak perempuan dari kelompok marginal.

d. Mengungkap kesenjangan antara desain normatif Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya dalam menjangkau anak- anak perempuan yang paling rentan terhadap praktik perkawinan dini di Kabupaten Dompu.

e. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis perspektif feminisme interseksional bagi Dinas P3A Kabupaten Dompu dan pemangku kebijakan terkait guna memperkuat efektivitas pencegahan perkawinan anak secara berkeadilan gender dan responsif terhadap keragaman kerentanan.

2. Signifikansi Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini memiliki signifikansi yang dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yaitu signifikansi teoritis dan signifikansi praktis. Keduanya saling melengkapi dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perbaikan kebijakan publik di bidang perlindungan anak dan kesetaraan gender.

a. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam beberapa hal sebagai berikut:

1) Pengembangan kajian kebijakan publik berbasis gender di Indonesia

Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan kebijakan publik dengan mendemonstrasikan penerapan perspektif feminisme interseksional sebagai alat analisis kebijakan. Pendekatan ini masih relatif jarang digunakan dalam kajian implementasi kebijakan di Indonesia, sehingga penelitian ini berkontribusi pada perluasan cakrawala metodologis dan teoritis dalam disiplin tersebut.

2) Pengembangan teori feminisme dalam konteks lokal Indonesia.

Penelitian ini berupaya mengkontekstualisasikan teori feminisme yang lahir dari tradisi akademik Barat ke dalam realitas sosio-kultural Indonesia, khususnya masyarakat Dompu dengan tradisi Mbojo-nya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pada upaya indigenisasi teori feminis yang lebih relevan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengalaman perempuan di Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya.

3) Penyumbang literatur pada studi perkawinan anak di Indonesia.

Penelitian ini mengisi celah akademik yang ada dalam kajian perkawinan anak dengan menghadirkan analisis yang tidak hanya berdimensi hukum atau sosiologis semata, tetapi juga mampu membaca persoalan ini melalui lensa interseksionalitas. Hal ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian- penelitian selanjutnya yang tertarik mengkaji isu perlindungan anak dari perspektif yang lebih holistik dan kritis.

4) Kontribusi pada studi implementasi kebijakan daerah

Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam analisis implementasi peraturan daerah (perda) dengan mengintegrasikan dimensi keadilan gender dan interseksionalitas ke dalam kerangka evaluasi kebijakan. Pendekatan ini dapat menjadi model analisis bagi kajian implementasi kebijakan daerah lainnya yang bersentuhan dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan sosial.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa dampak dan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak, sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Bagi Dinas P3A Kabupaten Dompu, penelitian ini menghadirkan evaluasi yang mendalam dan konstruktif terhadap strategi dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

program implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 yang selama ini telah dijalankan. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan program kerja yang lebih responsif gender, inklusif, dan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap perkawinan anak.9

2) Bagi Pemerintah Provinsi NTB, penelitian ini memberikan umpan balik berbasis bukti mengenai efektivitas implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di salah satu kabupaten dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan revisi kebijakan, serta sebagai referensi dalam pengembangan peraturan pelaksana yang lebih operasional dan berkeadilan.

3) Bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, penelitian ini menyediakan.

D. Kajian Pustaka

1. Artikel yang ditulis oleh H. Ahsanul Halik pada tahun 2017 dengan judul" pernikahan dibawah umur" di dalam artikel ini menjelaskan tentang banyaknya terjadi pernikahan anak di NTB khususnya di kota mataram memiliki upaya dalam pencegahan pernikahan dibawah umur di tengah-tengah masyarakat, dalam penelitian ini lebih menginformasikan bahwasanya penting untuk menikah sesuai dengan usia yang telah

ditentukan oleh peraturan Negara, dengan demikian kan mengurangi kegagalan dalam berumah tangga. Adapun persamaan penelitian yang akan dilaksanakan yakni sama- sama meneliti tentang maraknya pernikahan dini, sedangkan perbedaannya adalah lebih ke menggunakan Maqashid Asy-Syariah, sedangkan peneliti lebih mengarah ke implikasi PERDA NTB tentang pencegahan perkawinan anak.[8]

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ananda Firdiansyah pada tahun 2023 dengan judul " Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Pereventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam" di dalam artikel ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam pada PERDA Nomor 5 Tahun 2021 yang memuat regulasi dengan menyentuh langsung ke setiap unsur masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pencegahan perkawinan usia dini. Adapun persamaan penelitian yang akan dilaksanakan yakni sama-sama meneliti tentang PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan perkawinan anak usia dini, sedangkan perbedaanya adalah lebih menggunakan pandangan hukum Islam sedangkan peneliti lebih menggunakan perspektif masyarakat dalam memahami PERDA NTB Nomor 5 tahun 2021.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] H. Ahsanul Halik pada Tahun 2017 dengan Judul *"Pernikahan dibawah umur"* desember 2017.

[9] Ananda Firdiansyah pada tahun 2023 dengan judul "*Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Pereventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam"* februari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Artikel yang ditulis oleh oleh Junaidin pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam artikel ini di jelaskan untuk mengetahui proses pelaksanaan perundang-undangan daerah. Nomor 5 Tahunm 2021. Adapun persamaan penelitian yang dilaksanakan yakni sama-sama meneliti tentang PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan perkawinan anak usia dini, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pedekatan sosialogis sedangkan peneliti peneliti lebih menggunakan perspektif masyarakat dalam memahami PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021.[10]

4. Jurnal ini ditulis oleh Vivi Tri Handayani pada Tahun 2023, dengan judul "Evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui program strategi nasional perkawinan anak (STRANAS PPA)". Dalam jurnal ini menjelaskan secara nasional target prevalensi perempuan usia 20-24 Tahun yang menikah sebelum 18 Tahun menurun dari 10,35 pada tahun 2020 menjadi 9,23 pada tahun 2021, namun pada tahun 2020 tidak mencapai target, dimana prevelensi pada tahun 2020 sebesar 10,19, namun capaiannya mencapai 10,35.[11]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Junaidin, "Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 45.

[11] Vivi Tri Handayani, "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Perkawinan Anak (STRANASPPA)," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 27, No. 1 (2023): 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jurnal ini di tulis oleh Sari dkk pada tahun 2020, dengan judul "Menganalisis PERDA Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tantang pencegahan perkawinan anak".14 Dalam jurnal ini menemukan bahwa efektivitas terrgantung pada sosialisasi dan sumber daya desa. Di NTB, evaluasi awal oleh DP3A NTB (2022) melaporkan bahwa PERDA No.5/2021 berhasil menurunkan kasus sebesar 20% di beberapa kabupaten, namun terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga.[12]

6. Kajian internasional seperti dari Work Bank Tahun 2018 dengan judul "Ending Child Marriage" menyarakan pendekatan berbasis Komunitas, yang sesuai dengan model Implemetasi di desa pedesaan.16 Penerapan kajian sering kali lemah karena terpencilnya geografis dan norma.[13]

7. Jurnal ini ditulis oleh Kusuma Tahun 2022 dengan judul " dalam jurnal ini menjelaskan tentang desa di NTB menemukan bahwa efektivitas PERDA tergantung pada peran kepala desa dan kelompok masyarakat. Data Dukcapil NTB (2021) menunjukan desa Tambora memiliki 50+kasus perkawinan anak dalam 5 Tahun Terakhir, dengan faktor seperti ekonomi pertanian dan akses pendidikan terbatas.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, *Laporan Evaluasi Awal Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak* (Mataram: DP3AP2KB NTB, 2022), hlm. 15

[13] World Bank, *Ending Child Marriage: Child Marriage Laws and Their Limitations*

(Washington, DC: World Bank Group, 2018), hlm. 24.

[14] Kusuma, "Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Perdesaan Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Tata Kelola Politik dan Pemerintahan* 5, No. 2 (2022): 88.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Penelitian Fadlyana dan Larasaty (2016) mengidentifikasi dampak multidimensi perkawinan anak: dari sisi kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko kematian ibu muda, komplikasi obstetrik, bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), dan penelitian Wahyuni (2020) di NTB yang menambahkan faktor budaya dan norma sosial sebagai hambatan struktural yang seringkali luput dari perhatian kebijakan.[15]

Dalam konteks Dinas P3A sebagai lembaga teknis utama implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah, penelitian Kementerian PPPA (2021) menyoroti disparitas kapasitas yang sangat besar antara Dinas P3A di kabupaten-kabupaten di pulau Jawa dengan yang ada di wilayah NTB, NTT, dan Papua. Ketimpangan ini mencakup aspek sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi), anggaran operasional, infrastruktur, serta jaringan koordinasi. Kabupaten Dompu sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas menghadapi tantangan tambahan dalam mengimplementasikan kebijakan yang menuntut keterlibatan multi pihak.

Integrasi perspektif gender dalam analisis kebijakan publik berkembang pesat sejak dekade 1990-an, dipicu oleh Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing (1995) yang menghasilkan Platform for Action dengan komitmen gender mainstreaming (pengaru sutamaan gender) dalam seluruh kebijakan pemerintah. Di Indonesia, komitmen ini di institusionalisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

[15] Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, No. 2 (2016): 138

Pengaru sutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Moser (1993) dalam karyanya Gender Planning and Development membedakan antara pendekatan Women in Development (WID), Gender and Development (GAD), dan pendekatan berbasis hak (rights-based approach). Pendekatan WID yang berfokus pada integrasi perempuan ke dalam program pembangunan yang ada dianggap tidak cukup karena tidak mempertanyakan relasi kuasa yang mendasari subordinasi perempuan. Pendekatan GAD yang lebih transformatif memandang relasi gender sebagai konstruksi sosial yang dapat dan harus diubah melalui kebijakan. Penelitian ini mengadopsi kerangka GAD yang dipadukan dengan perspektif interseksional untuk menganalisis Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021.[16]

Dalam konteks Indonesia tentang kebijakan perlindungan perempuan di daerah menemukan bahwa sebagian besar kebijakan daerah terkait perempuan masih bersifat gender-sensitive di permukaan tetapi gender-blind dalam substansi dan mekanisme implementasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut seringkali mengasumsikan bahwa semua perempuan memiliki pengalaman dan kebutuhan yang homogen, mengabaikan variasi berdasarkan kelas, etnis, agama, dan geografi. Temuan ini membuka ruang

[16] Caroline Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*

(London: Routledge, 1993), 65–70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagi pertanyaan yang sama untuk diajukan kepada Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021.[17]

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, penelitian ini menempati posisi yang khas di persimpangan tiga bidang kajian: studi kebijakan publik, studi gender dan feminisme, serta kajian perlindungan anak. Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini adalah yang pertama secara eksplisit menggunakan kerangka feminisme interseksional untuk mengkritisi implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di tingkat kabupaten. Kedua, penelitian ini mengambil Dinas P3A Kabupaten Dompu sebagai locus spesifik yang belum pernah dikaji secara mendalam dari perspektif gender. Ketiga, penelitian ini berupaya mengontekstualisasikan teori feminisme interseksional yang lahir dari tradisi akademik Barat ke dalam realitas sosio-kultural masyarakat Mbojo di Dompu, berkontribusi pada upaya indigenisasi teori feminis dalam konteks Indonesia.

E. Kerangka Teoretis

1. Landasan Teori

Penelitian ini dibangun di atas empat pilar teori utama yang saling melengkapi dan bekerja secara integrative Teori Feminisme Interseksional sebagai pisau analisis kritis utama, Teori Implementasi Kebijakan Publik sebagai kerangka evaluasi, Teori Patriarki Struktural sebagai landasan analisis akar masalah, dan Teori Hak Anak sebagai kerangka normatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Caroline Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* (London: Routledge, 1993), 65–70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengisi dan membatasi dalam membentuk kerangka analisis yang koheren.

a. Teori Feminisme

1) Pengertian Feminisme

Feminisme sebagai konsep akademik lahir dari rahim gerakan feminismeuli Hitam (*Black Feminism*) di Amerika Serikat pada akhir 1980-an, sebagai respons kritis terhadap keterbatasan feminisme gelombang kedua (second-wave feminism) yang cenderung berpusat pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah. Feminisme gelombang kedua, meskipun berhasil membongkar banyak aspek penindasan berbasis gender, dikritik karena mengasumsikan universalitas pengalaman perempuan dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang dihasilkan oleh ras, kelas, dan faktor-faktor identitas lainnya.[18]

Kimberle Williams Crenshaw (1989) adalah tokoh yang pertama kali mengkodifikasi konsep ini secara akademis dalam artikelnya Demarginalizing the Intersection of Race and Sex yang diterbitkan dalam University of Chicago Legal Forum. Ia menggunakan metafora persimpangan jalan untuk menjelaskan bagaimana perempuan Kulit Hitam menghadapi diskriminasi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh kerangka diskriminasi ras saja atau diskriminasi gender saja. Crenshaw menulis bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Mary E. John, *"Child marriage in an International Frame : A Feminist Review from India"* (Routledge, September 2023), Hal 35-40.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ketika sistem hukum hanya memandang diskriminasi melalui satu sumbu identitas, mereka yang berada di persimpangan berbagai sumbu tersebut menjadi tidak terlihat (invisible) dan tidak terlindungi.[19]

Sedangkan gagasan Patricia Hill Collins (1990) memperluas konsep Crenshaw melalui karyanya *Black Feminist Thought: Knowledge*, *Consciousness, and the Politics of Empowerment. Collins memperkenalkan gagasan matrix of domination*, yakni kerangka di mana berbagai sistem penindasan rasisme, seksisme, klasisme, dan heteroseksisme tidak hanya beroperasi secara paralel, tetapi saling memperkuat dan mengkonfigurasi satu sama lain. Collins menegaskan bahwa tidak ada hierarki antara berbagai bentuk penindasan; semuanya sama-sama nyata dan saling berkaitan dalam membentuk pengalaman kelompok-kelompok terpinggirkan.[20]

Bell hooks (1984) dalam karyanya *Feminist Theory: From Margin to Center*, memberikan kontribusi penting dengan argumennya bahwa perspektif dari margin (pinggiran) yakni dari sudut pandang mereka yang paling terpinggirkan justru memberikan wawasan yang paling komprehensif tentang kerja sistem-sistem penindasan. Implikasi argumen hooks bagi penelitian ini adalah pentingnya menempatkan pengalaman anak perempuan termiskin

[19] Ibid, Hal. 70-79

[20] atricia Hill Collins, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (Boston: Unwin Hyman, 1990), 225–230.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan paling terpencil di Kabupaten Dompu sebagai titik berangkat analisis, bukan sekadar sebagai kasus yang dianalisis dari luar.[21]

Penelitian ini mengadopsi pendekatan interkategorikal dalam kerangka McCall. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan bagaimana berbagai sumbu identitas gender, kelas sosial, geografi (desa/kota, terpencil/pusat), dan budaya (adat Mbojo, agama) saling bersilang untuk menciptakan pengalaman kerentanan yang berbeda-beda di antara anak-anak perempuan di Kabupaten Dompu. Pilihan pendekatan ini juga didasarkan pada pertimbangan praktis: pendekatan interkategorikal paling kompatibel dengan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Empat Dimensi Interseksionalitas dalam Konteks Perkawinan Anak di Dompu Berdasarkan kerangka teoritis di atas dan mempertimbangkan konteks sosio-kultural Kabupaten Dompu, penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi interseksi yang paling relevan dalam membentuk kerentanan anak perempuan terhadap perkawinan dini.

a) Dimensi Pertama, Gender: Sebagai sumbu identitas paling fundamental, gender dalam masyarakat Dompu beroperasi melalui konstruksi peran gender tradisional yang menempatkan

[21] bell hooks, *Feminist Theory: From Margin to Center* (Boston: South End Press, 1984), 14–16.

perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga (ina ro bapa), makhluk yang ditakdirkan untuk peran domestik dan reproduktif, serta objek transaksi perkawinan. Konstruksi gender ini secara aktif mereproduksi norma yang menormalisasi perkawinan anak perempuan pada usia muda sebagai sebuah pencapaian sosial, bukan sebagai pelanggaran hak.

b) Dimensi Kedua, Kelas Sosial dan Ekonomi: Kemiskinan sebagai faktor struktural berinteraksi dengan konstruksi gender untuk menciptakan tekanan berlapis bagi anak perempuan dari keluarga miskin. Bagi keluarga dengan sumber daya ekonomi terbatas, pernikahan putri mereka dipersepsi sebagai solusi ekonomi: mengurangi tanggungan keluarga, mendapatkan mas kawin, atau membangun aliansi ekonomi dengan keluarga yang lebih kaya. Interseksi gender dan kelas ini menciptakan situasi di mana anak perempuan miskin menghadapi risiko perkawinan anak yang secara signifikan lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka dari keluarga berada.

c) Dimensi Ketiga, Geografis dan Aksesibilitas: Letak geografis yang terpencil tidak hanya berarti keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap informasi tentang hak-hak anak, layanan perlindungan dari Dinas P3A, dan mekanisme hukum yang tersedia. Anak perempuan di desa-desa terpencil di Kabupaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dompu menghadapi hambatan ganda: mereka adalah yang paling rentan terhadap perkawinan anak sekaligus yang paling sulit dijangkau oleh intervensi kebijakan.

d) Dimensi Keempat Budaya dan Agama: Tradisi adat Mbojo, termasuk pranata mbolo weki sebagai forum musyawarah komunitas, seringkali beroperasi dalam kerangka nilai patriarkal yang mengesampingkan suara dan kepentingan anak perempuan. Interpretasi keagamaan yang membenarkan pernikahan anak perempuan pada usia muda meskipun bertentangan dengan hukum negara memberikan legitimasi moral yang kuat bagi praktik ini. Interaksi antara norma budaya, interpretasi agama, dan posisi gender subordinat menciptakan struktur normatif yang sangat kuat dalam mendukung perkawinan anak.

2) Interseksionalitas sebagai Alat Kritik Kebijakan Publik

Verloo (2006) dalam kajiannya tentang multiple inequalities, gender, and European social policy mengembangkan kerangka analisis interseksional untuk kebijakan publik yang ia sebut sebagai intersectional policy analysis. Kerangka ini mengajukan tiga pertanyaan kritis kepada setiap kebijakan: Kelompok mana yang dimaksudkan sebagai penerima manfaat kebijakan, dan apakah definisi kelompok sasaran mencerminkan keragaman pengalaman berdasarkan interseksi berbagai identitas?,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permasalahan apa yang diidentifikasi sebagai akar penyebab dalam kerangka kebijakan, dan apakah framing permasalahan tersebut mengabaikan dimensi interseksional?, Solusi apa yang diusulkan, dan apakah solusi tersebut berpotensi mengubah atau justru mereproduksi relasi kuasa yang mendasari ketidaksetaraan?[22]

Dalam penelitian ini, ketiga pertanyaan Verloo diterapkan secara sistematis pada implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 oleh Dinas P3A Kabupaten Dompu. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap apakah kebijakan pencegahan perkawinan anak di Dompu benar-benar bersifat gender-transformative yakni mampu mentransformasi relasi kuasa yang menjadi akar permasalahan ataukah ia hanya bersifat gender-sensitive di permukaan tanpa menyentuh struktur-struktur yang memproduksi dan mereproduksi perkawinan anak.

Konteks implementasi mencakup tiga elemen kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, yang menentukan dinamika politik di sekitar implementasi kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim, yang meliputi budaya organisasi, prosedur kerja, dan orientasi nilai aparat pelaksana serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap, yang mengukur sejauh mana pelaksana bersedia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Mieke Verloo, "Multiple Inequalities, Gender, and European Social Policy," *European Journal of Women's Studies* 13, No. 3 (2006): 221–223

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan mampu mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan mandat normatifnya. Dalam penelitian ini, kedua variabel model Grindle dioperasionalisasikan secara spesifik untuk konteks Dinas P3A

3) Model Implementasi Edwards III: Empat Faktor Kritikal

George C. Edwards III (1980) dalam bukunya Implementing Public Policy mengidentifikasi empat faktor yang secara simultan dan saling berinteraksi menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

a) Pertama, komunikasi (communication) yang meliputi tiga aspek: transmisi (apakah pesan kebijakan sampai kepada pelaksana dengan tepat), kejelasan (apakah pesan kebijakan dipahami secara konsisten), dan konsistensi (apakah instruksi yang diterima pelaksana tidak saling bertentangan). Komunikasi yang efektif mensyaratkan bahwa setiap pelaksana kebijakan dari level Dinas P3A Provinsi NTB hingga petugas lapangan di desa memahami dengan presisi apa yang harus mereka lakukan.[23]

b) Kedua, sumber daya (resources) yang mencakup sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi personel), sumber daya finansial (anggaran yang memadai), sumber daya informasi (data dan pengetahuan yang dibutuhkan), dan kewenangan formal yang memberikan legitimasi bagi tindakan implementasi.

[23] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional

Quarterly Press, 1980), 10–15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Defisit pada salah satu jenis sumber daya dapat menghambat keseluruhan proses implementasi.

c) Ketiga, disposisi (disposition) yakni sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan mandat kebijakan. Implementasi yang efektif membutuhkan tidak hanya kemampuan teknis (can do), tetapi juga kemauan politis dan moral (will do) dari para pelaksana.

d) Keempat, struktur birokrasi (bureaucratic structure) yang meliputi standar prosedur operasi (standard operating procedures) dan fragmentasi antara berbagai unit atau lembaga yang terlibat dalam implementasi.

SOP yang terlalu rigid dapat menghambat fleksibilitas yang diperlukan dalam merespons keunikan setiap kasus, sementara fragmentasi yang berlebihan dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi dan tumpang tindih tanggung jawab. Dalam konteks Dinas P3A Kabupaten Dompu yang harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga Pengadilan Agama, KUA, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, tokoh adat, dan LSM faktor struktur birokrasi menjadi krusial untuk dianalisis.

4) Perspektif Gender dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi konvensional dari Grindle dan Edwards III, meskipun komprehensif, tidak secara eksplisit mempertimbangkan dimensi gender dalam analisis implementasi. Rao dan Kelleher

(2005) dalam kajian mereka tentang Gender at Work: Organizational Change for Equality berargumen bahwa lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Dinas P3A, beroperasi dalam konteks budaya organisasi yang seringkali secara tidak sadar mereproduksi asumsi-asumsi gender yang dominan.[24] Hal ini dapat mempengaruhi cara lembaga mendefinisikan permasalahan, menetapkan prioritas, dan merancang intervensi.

Untuk mengisi keterbatasan ini, penelitian ini mengintegrasikan perspektif analisis kelembagaan berbasis gender (gender-sensitive institutional analysis) yang dikembangkan oleh Goetz (1997) dalam karyanya Getting Institutions Right for Women in Development. Goetz berargumen bahwa analisis kelembagaan yang sensitif gender harus memeriksa: aturan-aturan formal (formal rules) yang mengatur hubungan gender dalam lembaga, norma-norma informal (informal norms) yang membentuk budaya kerja, serta praktik-praktik keseharian (everyday practices) yang mereproduksi atau mentransformasi relasi gender dalam konteks kerja.[25] Ketiga dimensi ini dioperasionalisasikan dalam analisis terhadap Dinas P3A Kabupaten Dompu.

b. Teori Patriarki Struktural

[24] Aruna Rao dan David Kelleher, "Gender at Work: Organizational Change for Equality," *Gender & Development* 13, No. 1 (2005): 60–62.

[25] Anne Marie Goetz, ed., *Getting Institutions Right for Women in Development* (London: Zed Books, 1997), 5–9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Patriarchy mendefinisikan patriarki bukan sekadar sebagai pola perilaku individual, melainkan sebagai sebuah sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Perbedaan definisi ini penting: memahami patriarki sebagai sistem berarti bahwa penindasan terhadap perempuan bukan sekadar produk dari kebiasaan buruk individu, melainkan merupakan hasil dari struktur-struktur sosial yang saling memperkuat dan beroperasi secara sistemik. Walby mengidentifikasi enam struktur patriarki yang saling berkaitan:

(1) mode produksi patriarkal dalam rumah tangga, di mana perempuan melakukan kerja domestik yang tidak dibayar di bawah otoritas suami atau ayah; (2) hubungan patriarkal dalam kerja berbayar, yang menciptakan segregasi dan subordinasi perempuan di pasar kerja;

(3) negara patriarkal, yang mereproduksi kepentingan laki-laki melalui kebijakan, hukum, dan birokrasi; (4) kekerasan laki-laki (male violence), baik fisik maupun seksual, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol atas perempuan; (5) seksualitas patriarkal, yang mengatur seksualitas perempuan sesuai kepentingan laki-laki; dan (6) institusi budaya patriarkal, yang mereproduksi ideologi gender melalui media, agama, pendidikan, dan adat istiadat. Mekanisme kontrol atas perempuan; (5) seksualitas patriarkal, yang mengatur seksualitas perempuan sesuai kepentingan laki-laki; dan (6) institusi budaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

patriarkal, yang mereproduksi ideologi gender melalui media, agama, pendidikan, dan adat istiadat. [26]

Dalam konteks Kabupaten Dompu, keenam struktur patriarki Walby dapat diidentifikasi beroperasi secara nyata. Rumah tangga patriarkal menempatkan anak perempuan di bawah otoritas penuh ayah dalam pengambilan keputusan perkawinan. Negara patriarkal, meskipun secara formal memiliki regulasi perlindungan anak, dalam praktiknya menyediakan mekanisme dispensasi kawin yang dapat melegitimasi perkawinan anak. Institusi budaya patriarkal dalam bentuk adat Mbojo memberikan sanksi sosial bagi keluarga yang membiarkan putrinya terlalu lama tidak menikah, menciptakan tekanan normatif yang kuat. Konstruksi Gender sebagai Performativitas. Judith Butler (1990) dalam Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity memberikan perspektif yang melengkapi teori patriarki struktural Walby dengan analisis tentang bagaimana gender diproduksi dan direproduksi pada level mikro-sosial. Butler berargumen bahwa gender bukanlah ekspresi dari identitas yang bersifat batin dan stabil, melainkan sebuah efek performatif yang dihasilkan melalui pengulangan tindakan, norma, dan regulasi sosial. Artinya, seseorang tidak memiliki gender sebagai atribut tetap, melainkan 'melakukan' gender melalui tindakan sehari-hari yang dibentuk oleh matriks normatif gender yang dominan.[27]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 19–21.

[27] Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York:

Routledge, 1990), 24–25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Implikasi teori Butler bagi analisis perkawinan anak sangat signifikan. Jika feminitas yang benar dalam masyarakat Dompu didefinisikan sebagai kesediaan untuk menikah dan menjadi istri dan ibu yang baik, maka seorang anak perempuan yang menolak pernikahan dini tidak hanya melanggar aturan sosial, tetapi dianggap gagal dalam performativitas gendernya — sebuah konsekuensi sosial yang berat. Kebijakan pencegahan perkawinan anak yang efektif, dalam perspektif Butler, harus mampu mengintervensi norma-norma performatif gender ini, bukan hanya melarang praktik perkawinan dini secara legal.

c. Teori Hak Anak sebagai Kerangka Normatif

Penelitian ini juga menggunakan kerangka hak anak children's rights framework sebagai landasan normatif yang melengkapi tiga pilar teori di atas. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) PBB 1989 yang menjadi instrumen hak anak paling diratifikasi dalam sejarah hukum internasional menetapkan empat prinsip dasar perlindungan anak: non-diskriminasi, yang melarang segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi berbasis gender, kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang mencakup hak atas pendidikan dan Kesehatan, serta penghormatan terhadap pandangan anak (respect for the views of the child) yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidupnya.[28]

Dalam perspektif hak anak, perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap keempat prinsip dasar tersebut secara serentak. Ia mendiskriminasi anak perempuan, mengabaikan kepentingan terbaik mereka demi kepentingan ekonomi atau sosial keluarga, merenggut hak mereka atas pendidikan dan kesehatan, dan secara efektif membungkam suara mereka dalam keputusan paling krusial dalam hidup mereka. Kerangka hak anak ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 benar-benar menempatkan anak khususnya anak perempuan sebagai subjek hak yang otonom, bukan sekadar objek perlindungan yang pasif.[29]

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan elaborasi teoritik di atas, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan empat pilar teori melalui tiga lapis analisis. Lapis pertama adalah analisis struktural normatif yang memeriksa konten Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 dari perspektif interseksionalitas dan hak anak: apakah norma-norma yang terkandung

[28] Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), 24–25.

[29] Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) dan Committee on the Rights of the Child (CRC), *Joint General Recommendation No. 31 of the Committee on the*

Elimination of Discrimination against Women/General Comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on Harmful Practices, UN Doc. CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 (November 14, 2014), hlm. 7–9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam kebijakan tersebut sudah sensitif terhadap keragaman pengalaman anak perempuan berdasarkan interseksi identitasnya? Lapis kedua adalah analisis institusional yang mengkaji cara Dinas P3A Kabupaten Dompu mengoperasionalkan kebijakan, dengan menggunakan model Grindle dan Edwards III yang diperkaya dengan perspektif gender kelembagaan Goetz.

Lapis ketiga adalah analisis sosio-kultural yang memetakan konteks masyarakat Dompu termasuk struktur patriarki Walby, performativitas gender Butler, dan kekhasan budaya Mbojo sebagai medan sosial di mana implementasi kebijakan berlangsung. Ketiga lapis analisis ini dirajut bersama oleh perspektif feminisme interseksional sebagai meta-kerangka yang mempertanyakan relasi kuasa pada setiap tingkatan. Kerangka konseptual ini secara visual dapat digambarkan sebagai tiga lapisan konsentris: lapisan luar adalah konteks sosio- kultural patriarkal, lapisan tengah adalah proses implementasi kelembagaan, dan lapisan dalam adalah anak perempuan sebagai subjek.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 1. Ringkasan Kerangka Teori, Konsep Kunci, dan Fungsi Analisis

No	Teori/Perspektif	Tokoh Utama	Konsep Kunci	Fungsi dalam Penelitian
1.	Feminisme Interseksionalitas	Crenshaw (1989); Collins (1990); hooks (1984); McCall (2005); Cho et al.(2013)	Matrix of domination; 4dimensi interseksi; invisibility; margin-center	Pisau kritik utama; mengungkap kerentanan berlapis anak perempuan
2.	Implementasi Kebijakan (Grindle)	Grindle (1980)	Content of policy;context of implementation; political will	Evaluasi komprehensif faktor implementasi Perda
3.	Implementasi Kebijakan (Edwards III)	Edwards III (1980)	Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi	Analisis kapasitas teknis dan administratif Dinas P3A
4.	Analisis Gender Kelembagaan	Goetz (1997); Rao & Kelleher (2005)	Aturan formal, norma informal, praktik keseharian gender	Analisis budaya organisasi Dinas P3A dari perspektif
5.	Teori Patriarki Struktural	Walby (1990)	Enam struktur patriarki yang saling memperkuat	Analisis akar struktural perkawinan anak di Dompu
6.	Teori Konstruksi Gender	Butler (1990)	Gender sebagai performativitas; norma gender	Analisis norma gender lokal dan peluang transformasinya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

7.	Teori Hak Anak	KHA PBB (1989); UNICEF	Non-diskriminasi; best interest; partisipasi anak	Kerangka normatif evaluasi kebijakan dari perspektif hak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Definisi Operasional

Berikut ini ditetapkan definisi operasional bagi konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjamin konsistensi analisis dan menghindari ambiguitas interpretasi sepanjang proses penelitian.

a. Interseksional: Perspektif analitis dan politis yang memandang bahwa pengalaman penindasan, kerentanan, dan ketidaksetaraan tidak dapat dipahami melalui satu sumbu identitas saja, melainkan merupakan produk dari perpotongan berbagai sumbu identitas (gender, kelas, geografi, budaya/agama) yang bekerja secara simultan dalam konteks spesifik Kabupaten Dompu.

b. Implementasi Kebijakan: Serangkaian tindakan, program, prosedur, mekanisme, dan keputusan yang dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten Dompu untuk mengoperasionalkan Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021, mencakup perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor, penjangkauan kelompok sasaran, pemantauan, dan evaluasi.

c. Perkawinan Anak: Ikatan perkawinan formal maupun informal yang melibatkan perempuan berusia di bawah 19 tahun sebagaimana batas usia minimal yang ditetapkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019, baik yang dilaksanakan berdasarkan hukum negara, hukum adat Mbojo, maupun secara keagamaan semata tanpa pencatatan resmi.

d. Kerentanan Berlapis (Multiple Vulnerabilities): Kondisi di mana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seorang anak perempuan di Kabupaten Dompu menghadapi risiko

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkawinan anak yang diperbesar oleh kombinasi simultan dari berbagai faktor yang saling bersilang: kemiskinan keluarga, letak geografis terpencil, norma budaya patriarkal, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya paparan terhadap layanan perlindungan anak.

e. Responsivitas Gender Kebijakan: Sejauh mana desain normatif dan praktik implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 oleh Dinas P3A Kabupaten Dompu secara aktif mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan merespons perbedaan kebutuhan dan kerentanan berdasarkan gender dan interseksinya melampaui sekadar menyebut anak.

f. Transformativitas Gender Kebijakan: Kapasitas suatu kebijakan dan proses implementasinya untuk tidak hanya merespons manifestasi permukaan dari ketidaksetaraan gender (seperti praktik perkawinan anak), tetapi secara aktif menantang dan mengubah struktur-struktur patriarkal, norma-norma gender, dan relasi kuasa yang menjadi akar produksi dan reproduksi perkawinan anak di Kabupaten Dompu.

g. Dinas P3A Kabupaten Dompu: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Dompu yang secara teknis bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pencegahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Dompu, termasuk seluruh aparatur, program, anggaran, dan mekanisme koordinasi yang beroperasi di bawah naungannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metodelogi penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis (*critical qualitative research*). Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan bersifat interpretatif dan evaluatif, bukan pengujian hipotesis statistik. Penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 berlangsung dalam konteks sosial, kultural, dan kelembagaan yang kompleks, serta mengungkap makna-makna yang melekat pada praktik-praktik kebijakan tersebut dari perspektif feminisme interseksional.

Creswell (2014) dalam Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches menjelaskan bahwa penelitian kualitatif paling tepat digunakan ketika peneliti berupaya memahami kompleksitas fenomena sosial dalam konteks naturalnya, ketika sudut pandang partisipan menjadi penting, dan ketika peneliti berperan sebagai instrumen utama pengumpulan dan interpretasi data.[30] Ketiga karakteristik tersebut melekat pada penelitian ini: kompleksitas implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak, pentingnya perspektif aktor-aktor yang terlibat dalam Dinas P3A Kabupaten Dompu, dan peran peneliti sebagai interpreter yang membawa kerangka feminisme interseksional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 185–189.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) dengan tipe instrumental case study sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Robert Stake (1995) dalam karyanya The Art of Case Study Research. Dalam studi kasus instrumental, kasus yang dipilih bukan semata-mata menarik karena dirinya sendiri, melainkan karena ia memberikan jendela yang berguna untuk memahami isu atau persoalan yang lebih luas.[31] Dalam penelitian ini, Dinas P3A Kabupaten Dompu sebagai locus penelitian dipilih bukan hanya karena spesifisitas kondisi Dompu, tetapi karena ia merupakan kasus yang representatif dari tantangan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di daerah dengan kapasitas terbatas dan kekhasan sosio-budaya yang kuat di wilayah NTB.

Yin (2018) dalam Case Study Research and Applications menegaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang paling tepat ketika peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana dan mengapa, ketika peneliti tidak memiliki kendali atas peristiwa yang diteliti, dan ketika fokus penelitian adalah fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Ketiga kriteria tersebut terpenuhi dalam penelitian ini: pertanyaan penelitian bersifat explanatory dan critical, peneliti tidak mengintervensi proses

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Robert E. Stake, *The Art of Case Study Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995), 3–4.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

implementasi kebijakan, dan fenomena yang diteliti adalah implementasi kebijakan yang sedang berlangsung.[32]

Studi kasus ini dirancang sebagai single case study dengan embedded units of analysis. Unit analisis utama adalah Dinas P3A Kabupaten Dompu sebagai lembaga pelaksana kebijakan. Unit analisis tersemat (embedded units) mencakup: program-program spesifik pencegahan perkawinan anak yang dijalankan Dinas P3A, mekanisme koordinasi dengan lembaga mitra, dan pengalaman kelompok sasaran yakni anak perempuan dan keluarga yang rentan terhadap perkawinan dini di Kabupaten Dompu.

Sebagai penelitian yang secara eksplisit mengadopsi perspektif feminisme interseksional, desain penelitian ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip feminist research methodology yang dikembangkan oleh Ramazanoglu dan Holland (2002) dalam Feminist Methodology: Challenges and Choices. Pertama, prinsip refleksivitas peneliti: peneliti secara aktif merefleksikan posisinya sendiri dalam hubungannya dengan subjek penelitian, mengakui bahwa interpretasi peneliti dipengaruhi oleh posisi sosial, nilai, dan komitmen politiknya. Kedua, prinsip pemberdayaan subjek: proses penelitian dirancang sedemikian rupa sehingga partisipan terutama perempuan dan anak memiliki ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka dengan cara yang dihormati dan tidak disederhanakan. Ketiga, prinsip analisis berlapis: desain penelitian memungkinkan analisis

[32] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, ed. ke-6 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 9–13.

yang tidak berhenti pada satu dimensi, melainkan menelusuri bagaimana berbagai sumbu identitas dan struktur sosial saling bersilang untuk membentuk pengalaman implementasi kebijakan yang berbeda-beda. Keempat, prinsip orientasi transformatif: penelitian ini tidak bertujuan sekadar mendeskripsikan realitas yang ada, tetapi juga menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan gender.[33]

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Kota Dompu. Selain Kantor Dinas P3A, penelitian juga dilaksanakan di beberapa lokasi pendukung, antara lain Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan terpilih, pemerintahan desa sampel, serta komunitas masyarakat di kecamatan-kecamatan dengan angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Dompu.

Pemilihan Kabupaten Dompu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Dompu secara konsisten mencatat angka perkawinan anak yang tergolong tinggi dalam

[33] Caroline Ramazanoglu dan Janet Holland, *Feminist Methodology: Challenges and Choices*

(London: SAGE Publications, 2002), 147–152.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konteks Provinsi NTB yang sendirinya berada di atas rata-rata nasional. Kedua, Kabupaten Dompu memiliki karakteristik sosio-kultural yang khas, termasuk kuatnya tradisi adat Mbojo dengan pranata-pranatanya yang mengatur relasi gender secara spesifik, menjadikannya kasus yang kaya untuk analisis interseksional. Ketiga, terdapat pertimbangan aksesibilitas penelitian yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang intensif dan mendalam.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua belas bulan, dimulai dari tahap persiapan dan penyusunan instrumen penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan, analisis data, penulisan laporan, hingga diseminasi hasil penelitian. Pengumpulan data lapangan direncanakan dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama selama tiga bulan untuk wawancara mendalam dengan informan dari unsur Dinas P3A dan lembaga mitra pemerintahan, dan tahap kedua selama dua bulan untuk wawancara dengan informan dari masyarakat dan observasi lapangan di komunitas sasaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Studi literatur & penyusunan instrumen	√	√										
Uji coba & perbaikan instrumen			√									
Pengumpulan data lapangan – Dinas & mitra pemerintah				√	√	√						
Pengumpulan data lapangan –masyarakat & observasi						√	√	√				
Analisis data & interpretasi									√	√		
Penulisan laporan											√	√

4. Sumber data dan Informasi Peneliti

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang saling melengkapi. Pertama, data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung. Data primer merupakan tulang punggung penelitian ini karena ia mampu menangkap nuansa, konteks, dan kompleksitas yang tidak dapat diperoleh dari sumber sekunder. Kedua, data sekunder yang meliputi dokumen kebijakan, laporan program, data statistik, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai dokumentasi tertulis yang relevan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Dompu.

b. Tehnik Penentuan Informasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian: informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Dompu. Snowball sampling digunakan untuk mengembangkan jaringan informan secara progresif berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya, yang memungkinkan peneliti menjangkau informan yang sulit diakses secara langsung.

Dalam perspektif feminisme interseksional, pemilihan informan secara sengaja mencakup individu-individu yang mewakili berbagai posisi interseksional yang berbeda dalam struktur sosial Kabupaten Dompu, termasuk aparat Dinas P3A perempuan dan laki-laki, tokoh adat dan agama yang memiliki pandangan beragam, perempuan korban dan penyintas perkawinan dini, serta anak perempuan yang saat ini berisiko. Keragaman posisi interseksional ini penting untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya mencerminkan perspektif satu kelompok saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 3. Daftar informan Penelitian

No	Kategori Informan	Lembaga/Posisi	Jumlah	Teknik Pemilihan
1.	Kepala Dinas & Pejabat P3A Kab.	Dinas P3A Kab. Dompu	3 orang	Purposive

	Dompu			
2.	Staf teknis & pendamping	Dinas P3A Kab.	4 orang	Purposive

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	lapangan	Dompu		
3.	Hakim/Panitera Pengadilan Agama	Pengadilan Agama Dompu	2 orang	Purposive
4.	Kepala KUA & Penyuluh KB	KUA & BKKBN Kab. Dompu	3 orang	Purposive
5.	Kepala Desa & Kader desa	Desa sampel terpilih	4 orang	Purposive
6.	Tokoh adat & tokoh agama	Komunitas masyarakat Dompu	4 orang	Purposive
7.	Aktivis LSM & pendamping perempuan	LSM lokal & nasional di Dompu	3 orang	Purposive
8.	Perkawinan anak	Masyarakat Dompu	5 orang	Snowball
9.	Orang tua dari keluarga rentan	Desa sampel terpilih	4 orang	Snowball
10.	Anak perempuan usia 13-17 tahun berisiko	Sekola & komunitas desa	Anak perempuan usia 13-17 tahun berisiko	Snowball
	Total Informan		37 orang	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khusus untuk informan dari kelompok rentan yakni perempuan penyintas perkawinan anak, orang tua dari keluarga miskin, dan anak perempuan berisiko penelitian ini menerapkan prosedur etis yang ketat. Wawancara dilakukan dengan pendekatan trauma-informed, peneliti memastikan bahwa partisipan memahami hak mereka untuk tidak

menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara sewaktu-waktu tanpa konsekuensi apapun. Identitas informan dari kelompok rentan ini dilindungi sepenuhnya melalui penggunaan inisial atau nama samaran dalam seluruh laporan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Teknik ini dipilih karena kemampuannya dalam menggali perspektif, pengalaman, interpretasi, dan makna yang dimiliki oleh informan secara kaya dan kontekstual. Kvale dan Brinkmann (2009) dalam InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing mendeskripsikan wawancara mendalam sebagai percakapan yang memiliki struktur dan tujuan, di mana pewawancara secara aktif mendengarkan, bertanya, dan mendorong informan untuk mengungkap pengetahuan mereka tentang dunia kehidupannya.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview guide) yang dikembangkan berdasarkan kerangka feminisme interseksional dan dimensi-dimensi analisis implementasi kebijakan. Panduan wawancara bersifat fleksibel: pertanyaan utama disiapkan sebelumnya, tetapi peneliti diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan probing yang relevan berdasarkan arah percakapan. Fleksibilitas ini penting untuk memungkinkan munculnya tema-tema tak terduga yang mungkin memiliki relevansi tinggi tetapi tidak terantisipasi dalam rancangan awal.

Setiap wawancara direncanakan berlangsung antara 60 hingga 120 menit, tergantung pada kedalaman informasi yang diberikan oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

informan. Dengan persetujuan informan, wawancara direkam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggunakan alat perekam audio untuk memastikan akurasi transkripsi. Untuk informan dari kelompok rentan khususnya anak perempuan dan penyintas perkawinan dini wawancara dilakukan di lingkungan yang aman, nyaman, dan dipilih sendiri oleh informan, dengan menggunakan bahasa daerah Mbojo apabila informan lebih nyaman berkomunikasi dalam bahasa tersebut, dengan bantuan penerjemah lokal yang terlatih.

b. Observasi Partisipatif Terbatas

Observasi partisipatif terbatas (limited participant observation) dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang konteks sosial dan kultural implementasi kebijakan yang tidak dapat diperoleh semata-mata melalui wawancara. Spradley (1980) dalam Participant Observation membedakan tiga tingkat keterlibatan observer: passive participation (observer hanya hadir tanpa berinteraksi), moderate participation (observer berinteraksi sebagian), dan active participation (observer terlibat penuh dalam kegiatan yang diamati). Penelitian ini menggunakan moderate participation: peneliti menghadiri pertemuan, rapat koordinasi, dan kegiatan program Dinas P3A sebagai pengamat aktif, tetapi tidak mengambil peran sebagai pelaksana.[34]

Objek observasi dalam penelitian ini mencakup: rapat koordinasi Dinas P3A dengan lembaga mitra dalam konteks pencegahan perkawinan anak, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang

[34] James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980),

59–61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilaksanakan oleh Dinas P3A di sekolah-sekolah dan komunitas, sidang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Dompu untuk memahami dinamika proses hukum yang terjadi, dan interaksi keseharian di komunitas desa yang menjadi sasaran program, untuk memahami bagaimana norma-

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Bowen (2009) dalam Qualitative Research through Case Studies menegaskan bahwa dokumen merupakan sumber data yang bernilai dalam penelitian kualitatif karena mereka tersedia secara alami, tidak reaktif terhadap kehadiran peneliti, dan dapat memberikan gambaran tentang konteks historis dan institusional yang tidak mungkin diperoleh melalui wawancara saja.[35]

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup tiga kategori. Pertama, dokumen kebijakan meliputi teks Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 beserta naskah akademiknya, peraturan pelaksana yang telah diterbitkan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3A Kabupaten Dompu, dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Kedua, dokumen program meliputi laporan kegiatan tahunan Dinas P3A, data statistik perkawinan anak di Kabupaten Dompu, data dispensasi kawin dari Pengadilan

[35] Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative*

Research Journal 9, No. 2 (2009): 29–31

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agama, dan proposal kegiatan pencegahan perkawinan anak. Ketiga, dokumen pendukung meliputi hasil penelitian terdahulu, laporan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di Kabupaten Dompu, serta pemberitaan media lokal yang relevan.

d. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan sebagai teknik pengumpulan data pendukung untuk mendapatkan perspektif kolektif dari kelompok-kelompok yang berbeda. Morgan (1997) dalam Focus Groups as Qualitative Research menjelaskan bahwa FGD paling efektif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana orang berpikir tentang suatu isu secara kolektif, termasuk dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan pendapat dan norma dalam kelompok.[36]

Penelitian ini merencanakan tiga sesi FGD yang berbeda berdasarkan komposisi peserta. Pertama, FGD dengan kelompok staf dan pendamping lapangan Dinas P3A untuk mendiskusikan tantangan implementasi di lapangan dari perspektif pelaksana kebijakan. Kedua, FGD dengan kelompok tokoh adat, tokoh agama, dan kader desa untuk mengeksplorasi perspektif mereka tentang perkawinan anak dan interaksinya dengan kebijakan pencegahan. Ketiga, FGD dengan kelompok perempuan muda dan remaja perempuan di desa sampel

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] David L. Morgan, *Focus Groups as Qualitative Research*, ed. ke-2 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997), 15–18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk mengeksplorasi pengetahuan, persepsi, dan pengalaman mereka terkait perkawinan anak dan akses terhadap perlindungan.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama pengumpulan dan analisis data. Hal ini berarti bahwa kualitas penelitian sangat bergantung pada kapasitas, kepekaan, dan integritas peneliti dalam melakukan pengumpulan dan interpretasi data. Untuk mendukung fungsi peneliti sebagai instrumen utama, digunakan beberapa instrumen pendukung berikut:

a. Panduan Wawancara (Interview Guide):

Panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan empat dimensi analisis utama: (a) persepsi dan pemahaman informan tentang Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021; (b) proses dan mekanisme implementasi kebijakan oleh Dinas P3A; (c) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, dengan perhatian khusus pada dimensi gender dan interseksionalitas; serta (d) dampak implementasi terhadap kelompok sasaran, terutama anak perempuan yang paling rentan.

b. Panduan Observasi (Observation Guide)

Panduan sistematis yang mencakup aspek- aspek yang perlu diamati selama observasi lapangan, meliputi dinamika interaksi dalam rapat koordinasi, substansi dan pendekatan kegiatan sosialisasi, respons

kelompok sasaran terhadap program, serta indikator-indikator budaya organisasi Dinas P3A yang relevan dengan responsivitas gender.

c. Checklist Dokumentasi

Daftar dokumen yang perlu dikumpulkan beserta kriteria relevansinya, untuk memastikan kelengkapan dan sistematisitas pengumpulan data dokumentasi.

d. Buku Catatan Lapangan (Field Journal)

Jurnal yang digunakan peneliti untuk mencatat observasi, refleksi, dan interpretasi awal secara sistematis selama proses pengumpulan data, termasuk refleksi tentang posisi dan pengaruh peneliti sebagai bagian dari proses penelitian.

e. Matriks Analisis Interseksional

Alat analisis yang dikembangkan secara khusus untuk penelitian ini, berupa matriks yang memetakan temuan data berdasarkan empat dimensi interseksionalitas (gender, kelas, geografi, budaya) dan tiga lapis analisis (normatif, institusional, sosio-kultural), untuk memastikan bahwa analisis benar-benar bersifat interseksional dan tidak reduktif.

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Tematik Interseksional

Teknik analisis data utama yang digunakan adalah analisis tematik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(thematic analysis) yang dipadukan dengan kerangka interseksional. Braun dan Clarke (2006) dalam Using Thematic Analysis in Psychology mendefinisikan analisis tematik sebagai metode untuk mengidentifikasi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) di dalam data. Penelitian ini menggunakan reflective thematic analysis yang dikembangkan lebih lanjut oleh Braun dan Clarke (2019), yang menekankan peran aktif peneliti dalam konstruksi makna dan interpretasi, sejalan dengan epistemologi feminis yang menolak klaim objektivitas positivistik.[37]

Proses analisis tematik dalam penelitian ini mengikuti enam tahap yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke. Pertama, familiarisasi data: peneliti membaca dan membaca ulang seluruh data transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan holistik. Kedua, pengkodean awal (initial coding): peneliti menghasilkan kode-kode yang menangkap fitur-fitur data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, menggunakan pendekatan in vivo coding (menggunakan kata-kata informan sendiri) maupun descriptive coding (deskripsi peneliti tentang isi data).

Ketiga, pencarian tema (*searching for themes*): kode-kode yang dihasilkan diorganisasikan ke dalam tema-tema potensial yang lebih luas. Pada tahap ini, matriks analisis interseksional digunakan untuk memastikan bahwa tema-tema yang diidentifikasi mencerminkan kompleksitas interseksional data, bukan menyederhanakan pengalaman berlapis informan ke dalam kategori-kategori tunggal. Keempat,

[37] Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Reflective or Reflexive? Committing to a Reflexive Approach to Thematic Analysis," *European Journal of Counselling Psychology* 8, No. 1 (2019): 9–11.

tinjauan tema (reviewing themes): tema-tema yang diidentifikasi ditinjau kembali dalam hubungannya dengan data keseluruhan untuk memastikan koherensi dan keterwakilan. Kelima, pendefinisian dan penamaan tema (defining and naming themes): setiap tema didefinisikan secara presisi dan diberi nama yang mencerminkan substansinya. Keenam, penulisan laporan: temuan dipaparkan secara naratif dengan kutipan-kutipan data yang representatif untuk mendukung setiap tema.

b. Analisis Kebijakan Feminis (Feminist Policy Analysis)

Selain analisis tematik, penelitian ini menggunakan feminist policy analysis sebagai kerangka analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Duerst-Lahti dan Kelly (1995) serta Verloo (2006). Feminist policy analysis mempertanyakan tiga dimensi kebijakan secara kritis: framing permasalahan (apakah akar penyebab perkawinan anak diidentifikasi secara tepat dan sensitif gender?), definisi target group (apakah kelompok sasaran kebijakan mencerminkan keragaman berdasarkan interseksi identitas?), dan solusi yang ditawarkan (apakah intervensi bersifat transformatif atau sekadar memperkuat status quo relasi gender?).[38]

Feminist policy analysis diterapkan secara spesifik pada: (a) analisis teks Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 untuk mengidentifikasi

[38] Georgia Duerst-Lahti dan Rita Mae Kelly, ed., *Gender Power, Leadership, and Governance*

(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995), 11–15; Mieke Verloo, "Another Velvet Revolution? Gender Mainstreaming and the Politics of Implementation," *IWM Working Paper*, no. 5 (2006): 7–11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

asumsi gender yang tersembunyi dalam norma-normanya; (b) analisis program dan kegiatan Dinas P3A untuk mengevaluasi apakah pendekatan yang digunakan cukup responsif terhadap kerentanan berlapis kelompok sasaran; dan (c) analisis mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi ada tidaknya bias gender dalam proses-proses institusional.

c. Prosedur Analisis

Analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, tidak menunggu hingga seluruh data terkumpul. Pendekatan ini, yang oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook disebut sebagai concurrent data collection and analysis, memungkinkan peneliti untuk secara iteratif memperbaiki pertanyaan wawancara, mengidentifikasi kesenjangan data, dan mengembangkan hipotesis sementara yang dapat diuji dalam pengumpulan data selanjutnya.[39]

Untuk mengelola volume data yang besar, penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif (CAQDAS) NVivo versi terbaru. Penggunaan NVivo membantu dalam pengorganisasian kode, pencarian teks, dan visualisasi hubungan antar tema, tetapi interpretasi substantif sepenuhnya tetap menjadi domain peneliti. Sesuai dengan prinsip refleksivitas feminis, peneliti secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31–33.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

teratur mendokumentasikan proses interpretasinya dalam jurnal analitik (analyticmemo) untuk memungkinkan audit trail yang transparan.

8. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan temuan penelitian, penelitian ini menerapkan empat kriteria trustworthiness yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam Naturalistic Inquiry, dengan adaptasi untuk perspektif feminis.[40]

a. Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas temuan dijamin melalui triangulasi sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen), triangulasi metode (wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi), member checking (temuan sementara dikonfirmasikan kepada informan kunci untuk memverifikasi akurasi interpretasi peneliti), dan peer debriefing dengan sesama peneliti yang memiliki expertise di bidang kebijakan gender dan studi perempuan. Perpanjangan keterlibatan peneliti di lapangan (prolonged engagement) selama minimal lima bulan juga berkontribusi pada kredibilitas dengan memungkinkan pembangunan kepercayaan dengan informan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks.

b. Transferabilitas (Transferability)

Meskipun penelitian studi kasus pada dasarnya tidak bertujuan generalisasi statistik, transferabilitas dijamin melalui thick description

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985), 289–301.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pendeskripsian konteks dan temuan secara rinci dan kaya sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan bagi konteks lain yang memiliki kesamaan. Deskripsi yang komprehensif tentang karakteristik Kabupaten Dompu, kondisi Dinas P3A, dan konteks sosio-kultural masyarakat Mbojo memungkinkan pembaca dan peneliti lain untuk menilai apakah dan sejauh mana temuan penelitian ini dapat ditransfer ke konteks serupa di daerah lain.

c. Dependabilitas (Dependability)

Dependabilitas dijamin melalui audit trail yang komprehensif: seluruh keputusan metodologis, prosedur pengkodean, dan proses interpretasi didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat diperiksa ulang oleh auditor eksternal. Panduan wawancara, catatan lapangan, memo analitik, dan catatan tentang proses pengkodean disimpan dan tersedia untuk keperluan verifikasi.

d. Konfirmabilitas (Confirmability)

Konfirmabilitas dijamin melalui refleksivitas peneliti yang terdokumentasi: peneliti secara eksplisit mengakui posisi, asumsi, dan komitmen nilai yang dibawanya ke dalam penelitian, dan mendokumentasikan bagaimana hal-hal tersebut mungkin mempengaruhi interpretasi. Dalam tradisi penelitian feminis, refleksivitas bukan sekadar syarat metodologis, melainkan komitmen etis untuk transparansi tentang posisionalitas peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Etika Penelitian

Penelitian ini menempatkan etika sebagai pertimbangan yang tidak dapat dipisahkan dari proses metodologis, bukan sekadar prosedur administratif yang harus dipenuhi. Hal ini terutama penting mengingat bahwa sebagian informan penelitian ini adalah individu dari kelompok rentan anak perempuan, perempuan penyintas perkawinan dini, dan keluarga miskin yang memerlukan perlindungan khusus.[41]

a. Persetujuan Berdasarkan Informasi (Informed Consent): Seluruh informan menerima penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, hak mereka untuk menolak atau mengundurkan diri sewaktu-waktu, dan cara data mereka akan digunakan dan dilindungi, sebelum memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Untuk informan anak (usia di bawah 18 tahun), informed consent diperoleh dari orang tua atau wali, disertai dengan assent (persetujuan) dari anak itu sendiri.

b. Kerahasiaan dan Anonimitas: Identitas seluruh informan dijaga kerahasiaannya. Nama asli tidak digunakan dalam transkripsi, laporan, maupun publikasi; sebagai gantinya digunakan kode atau nama samaran. Data yang dapat mengidentifikasi informan disimpan secara terpisah dari data wawancara dan hanya dapat diakses oleh peneliti utama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[41] O Lexy Meoloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Roadakarya, 2010), hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Perlindungan dari Bahaya (Protection from Harm): Penelitian ini menerapkan prinsip do no harm secara ketat. Topik-topik sensitif seperti pengalaman kekerasan, trauma perkawinan dini, dan konflik keluarga didekati dengan menggunakan pendekatan trauma-informed. Peneliti bersiap untuk menghentikan wawancara dan menyediakan rujukan ke layanan dukungan psikososial apabila informan menunjukkan tanda-tanda distress selama proses wawancara.

d. Timbal Balik (Reciprocity): Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi informan dan komitmen terhadap prinsip etis penelitian feminis, penelitian ini berkomitmen untuk mendesiminasikan temuan kepada komunitas dan lembaga yang berpartisipasi dalam bentuk yang dapat diakses dan berguna bagi mereka, termasuk penyampaian rekomendasi kebijakan kepada Dinas P3A Kabupaten Dompu.

e. Izin Etik dan Administrasi: Penelitian ini memperoleh izin etik dari komite etik penelitian institusi, serta izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Dompu dan Dinas P3A Kabupaten Dompu sebelum pengumpulan data dimulai.[42]

Tabel 4. Matriks Kesesuaian Pertanyaan Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Analisis

Pertanyaan Penelitian	Sumber Data Utama	Teknik Pengumpulan	Teknik Analisis
Bagaimana bentuk implementasi Perda NTB	Pejabat & staf Dinas P3A; dokumen	Wawancara mendalam; studi	Analisis tematik; analisis kebijakan feminis

	program	dokumentasi	

[42] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabareta, 2019), 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No. 5/2021 oleh Dinas P3A Dompu?			
Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas implementasi?	Seluruh kategori informan; observasi	Wawancara; observasi; FGD	Analisis tematik; model Grindle & Edwards III
Bagaimana perspektif interseksional mengungkap keterbatasan kebijakan?	Penyintas; anak perempuan berisiko; aktivis LSM	Wawancara mendalam; FGD	Analisis tematik interseksional; feminist policy analysis
Rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan?	Sintesis seluruh data dan temuan	Triangulasi seluruh teknik	Sintesis analitik berbasis interseksionalitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai feminisme dalam kebijakan daerah. Peraturan tersebut mengakomodasi prinsip kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta penghapusan diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu, perda ini memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat NTB yang lebih adil, setara, dan menghormati hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan kebijakan daerah yang bertujuan melindungi hak- hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia di bawah ketentuan hukum, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perda ini lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak di NTB yang berdampak pada kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Perda ini mengatur upaya pencegahan, peran dan tanggung jawab pemerintah, keluarga, masyarakat, pembentukan satuan tugas, mekanisme pengaduan dan pendampingan, serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2021 menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka perkawinan anak melalui edukasi, sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, implementasinya masih menghadapi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tantangan berupa faktor budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan remaja, serta praktik tradisi tertentu yang masih mendorong terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat agar tujuan perda dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi

   Melakukan penyuluhan rutin di sekolah, desa, dan komunitas mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menjangkau remaja secara lebih efektif.

2. Memperkuat peran keluarga

   Memberikan pendidikan parenting kepada orang tua agar mampu mendampingi dan mengawasi perkembangan anak. Mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak terkait pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan.

3. Meningkatkan akses pendidikan

   Menjamin anak tetap bersekolah hingga jenjang menengah atas dan mencegah putus sekolah. Menyediakan beasiswa bagi keluarga kurang mampu yang berisiko menikahkan anaknya karena faktor ekonomi.

4. Penguatan ekonomi keluarga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan. Memberikan bantuan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang tepat sasaran untuk mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi penyebab perkawinan anak. Pembentukan dan penguatan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak Mengoptimalkan peran Satgas hingga tingkat desa dan kelurahan untuk melakukan deteksi dini, pendampingan, dan penanganan kasus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

Bacchi, C. (2009). Analysing Policy: What's the Problem Represented to be?. Pearson Higher Education AU.

BPS Provinsi NTB. (2021). Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.

Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflective thematic analysis: A commentary.

Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589-597.

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.

Collins, P. H. (1990). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Routledge.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antiques discrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Duerst-Lahti, G., & Kelly, R. M. (1995). Gender Power, Leadership, and Governance. University of Michigan Press.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Sari Pediatri, 11(2), 136-141.

Firdiansyah, A. (2023). Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Hukum Islam, 21(1).

Goetz, A. M. (1997). Getting Institutions Right for Women in Development. Zed Books.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.

Halik, H. A. (2017). Pernikahan di bawah umur (Studi upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kota Mataram). Jurnal Maqasid Asy-Syariah, 5(2).

Handayani, V. T. (2023). Evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Jurnal Kebijakan Publik, 14(2).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hooks, b. (1984). Feminist Theory: From Margin to Center. South End Press.

Junaidin. (2023). Implementasi pencegahan pernikahan dini menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Sosiologi Hukum, 4(1).

Kusuma. (2022). Peran kepala desa dan kelompok masyarakat dalam efektivitas Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB. Jurnal Pemerintahan Desa, 8(3).

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (2nd ed.). SAGE Publications.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications.

McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 30(3), 1771-1800.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Morgan, D. L. (1997). Focus Groups as Qualitative Research (2nd ed.). SAGE Publications.

Moser, C. O. (1993). Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. Routledge.

Ramazanoglu, C., & Holland, J. (2002). Feminist Methodology: Challenges and Choices. SAGE Publications.

Rao, A., & Kelleher, D. (2005). Is there life after gender mainstreaming?.

Gender & Development, 13(2), 57-69.

Sari, dkk. (2020). Menganalisis Perda Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(2).

Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. Holt, Rinehart and Winston. Stake,

R. E. (1995). The Art of Case Study Research. SAGE Publications.

UNICEF Indonesia. (2021). Laporan Pemetaan Faktor Sosial Ekonomi Pendorong

Praktik Perkawinan Anak di Indonesia. UNICEF.

Verloo, M. (2006). Multiple inequalities, gender, and European social policy.

European Journal of Women's Studies, 13(3), 211-228.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wahyuni. (2020). Faktor budaya dan norma sosial sebagai hambatan struktural kebijakan pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Studi Gender dan Anak, 15(1).

Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Blackwell Publishers.

World Bank. (2018). Ending Child Marriage: Economic Costs and Policy Solutions. The World Bank Group.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.

Dokumen Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989

(Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

Laporan Instansi dan Data Lapangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). Laporan Evaluasi Disparitas Kapasitas Kelembagaan Dinas P3A di Indonesia. Kementerian PPPA RI.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTB. (2022). Laporan Evaluasi Awal Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pemerintah Provinsi NTB.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi NTB. (2021). Data Statistik Angka Perkawinan Anak Kecamatan Tambora Kabupaten Dompu. Dokumen Internal tidak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Transkrip Wawancara Lapangan. (2022). Hasil Wawancara Mendalam dengan Akhdiansyah, S.Hi. (Ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTB). Yogyakarta/Mataram.

Transkrip Wawancara Lapangan. (2025). Hasil Wawancara Mendalam dengan Abdul Sahid, SH. (Kepala Dinas PPPA Kabupaten Dompu). Dompu.

Transkrip Wawancara Lapangan. (2025). Hasil Wawancara Mendalam dengan Ibu Endang Pujiastuti, S.H. (Bidang Pengembangan Informasi Dinas PPPA Kabupaten Dompu). Dompu.

Transkrip Wawancara Lapangan. (2025). Hasil Wawancara Mendalam dengan Sirajudin, S.H. (Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Dompu). Dompu.

Transkrip Wawancara Lapangan. (2025). Hasil Wawancara Mendalam dengan Nadira Al Habsyi (Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB). Mataram.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA